



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 April 2018.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017; 2. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018; 3. Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI); 4. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2018; dan 5. Lain-lain.
Hadir	: 37 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mohamad Nasir/Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 16.10 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menristekdikti RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kementerian Ristekdikti RI menyampaikan beberapa hal antara lain:

- 1. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017.**
 - 1) Rekomendasi BPK RI yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemenristekdikti RI:**

- a. Memberi sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
- b. Berkoordinasi dengan Kemenkeu menunjuk institusi yang berwenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan awal PTNBH UNAIR
- c. Menarik kelebihan pembayaran dan menagih kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara/kas PTN terkait
- d. Menginstruksikan PPK untuk mengevaluasi perhitungan harga kontrak dengan menyusun *addendum* kontrak sesuai dengan kebutuhan
- e. Menyelesaikan serah terima aset milik Kemenkes berupa bangunan dan peralatan di RSKI dan lab.

2) Kemenristekdikti RI menyampaikan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI:

- a. Rektor UNLAM telah memberi sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset.
- b. Rektor UNAIR akan berkoordinasi dengan kemenristekdikti RI dan kemenkeu dan selanjutnya meminta KPKNL setempat untuk melaksanakan inventarisasi kekayaan awal PTNBH UNAIR.
- c. PTN telah menindaklanjuti dengan menyetorkan sebagian temuan BPK ke Kas Negara (Rp896,23 juta) oleh UNUD, UNLAM, dan UNAIR.
- d. Wakil Rektor UNUD telah memerintahkan PPK untuk mengevaluasi perhitungan harga kontrak dengan menyusun *addendum* kontrak sesuai kebutuhan.
- e. Rektor UNAIR telah berkoordinasi dengan Sekjen untuk menugaskan Biro Keuangan dan Umum menyelesaikan serah terima aset milik Kemenkes.

3) Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018;

Realisasi penyerapan APBN Tahun 2018 sampai dengan 20 April 2018 adalah sebesar Rp9.433.795.732.646,- (sembilan triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 22,49 % dari APBN TA 2018.

4). Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI);

- a. Pembentukan L2 Dikti merupakan amanah Pasal 57 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Terjadi perubahan struktur organisasi pada Kopertis menjadi L2DIKTI yaitu koordinator, sekretaris pelaksana, kepala bagian umum, dan kepala bidang pada Kopertis menjadi kepala, sekretaris dan tenaga ahli pada L2DIKTI.
- c. L2DIKTI dengan Sekretariat Tipe A terdiri dari L2DIKTI Wilayah III Jakarta, Wilayah IV Jawa Barat, Wilayah VI Jawa Tengah, Wilayah IX Makasar, dan W ilayah X Padang.

- d. L2DIKTI dengan Sekretariat Tipe B terdiri dari Wilayah I Medan, Wilayah II Palembang, Wilayah V Yogyakarta, Wilayah VIII Denpasar, Wilayah XI Banjarmasin, Wilayah XII Ambon, Wilayah XIII Aceh, Wilayah XIV Papua dan Wilayah XV NTT.

5) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2018;

- a. SNMPTN merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil penelusuran Prestasi Akademik dengan menggunakan Nilai Rapor dan Portofolio Akademik.
- b. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul dan rekam jejak prestasi akademik serta terdaftar di PDSS.

B. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI adalah sbb:

1. Terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan temuan SPI, kepatuhan UU, dan potensi kerugian negara, serta tindak lanjut yang telah dan yang belum dilakukan.
2. Terhadap daya serap APBN TA 2018 per 20 April 2018 di Ditjen Kelembagaan dan Ditjen Inovasi yang masih di bawah 10%, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI agar mempercepat pelaksanaan kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Terhadap pembentukan L2DIKTI, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI bahwa pembentukan L2DIKTI telah didahului kajian yang komprehensif.
4. Terhadap merger PTS, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenristekdikti RI untuk berkoordinasi dengan BAN PT, BSNP, dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaan merger tersebut tidak mengorbankan para mahasiswa dan tujuan pendidikan tinggi.
5. Terhadap program studi vokasi, Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk membuat kajian program doktoral studi kepariwisataan dan studi kesejahteraan sosial guna memenuhi SDM yang berkualitas dan kompeten.
6. Terhadap kebijakan yang berkaitan dengan penelitian, Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI agar lebih memperhatikan para peneliti dan perekayasa dengan memberikan penghargaan yang positif.
7. Terhadap program *World Class University* dan *World Class Professor*, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan tujuan utama WCU, kebermanfaatannya, peta jalan (*road map*) jenjang dan karier dosen dan peneliti Indonesia untuk memenuhi kualifikasi standar kelas dunia.
8. Terhadap *Cyber University* dan kuliah jarak jauh, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenristekdikti RI bahwa penjamin mutu dalam proses pembelajaran harus tetap terjaga, lulusan berkualitas, dan memenuhi kebutuhan dunia kerja.

9. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat pada tanggal 9 Mei 2018 terhadap poin II.B.1 s.d. 8 dan seluruh tanggapan/masukan/pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.40 WIB

**MENTERI RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI RI.**



MOHAMAD NASIR

KETUA RAPAT,



DR. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M.